#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Organisasi sektor publik di Indonesia khususnya pemerintah daerah kini dalam praktiknya muncul menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas. merupakan bentuk kewajiban mempertanggung Akuntablitas iawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Madiasmo, 2006 dalam Rahmadani, 2015). Selain itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang bagaimana pemerintah mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah merupakan representasi posisi keuangan dari berbagai transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik yang bertujuan untuk memberikan informasi keuangan entitas tersebut (Bastian, 2006 dalam Rahmadani, 2015).

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 542 LKPD Tahun 2017 mengungkapkan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 411 (76%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 113 (21%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 18 (3%) LKPD. Dalam 5 tahun terakhir (2013-2017), opini LKPD mengalami perbaikan. Selama periode

tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebanyak 46 persen, yaitu dari 30% LKPD Tahun 2013 menjadi 76% LKPD Tahun 2017. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini TMP mengalami penurunan sebanyak 6 persen dari 9% LKPD Tahun 2013 menjadi 3% LKPD Tahun 2017. Perkembangan opini selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik 1.1 dibawah ini.

70%
58%
59%
47%
30%
2013
2014
2015
2016
2017
30%
WTP
WDP
TMP
TW

Sumber: ihps semester 1 2018

Gambar 1.1 Perkembangan Opini LKPD tahun 2013-2017

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2016, kualitas LKPD Tahun 2017 mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan kenaikan opini WTP sebesar 6 poin persen yaitu dari 70% pada LKPD Tahun 2016 menjadi 76% pada LKPD Tahun 2017. Pada LKPD Tahun 2016, sebanyak 378 dari 542 LKPD memperoleh opini WTP (70%), sedangkan pada LKPD Tahun 2017 sebanyak 411 dari 542 LKPD memperoleh opini WTP (76%). Selain kenaikan jumlah opini WTP, juga terjadi kenaikan opini dari opini TMP menjadi opini WDP sebanyak 7 LKPD dan dari opini WDP menjadi WTP sebanyak 45 LKPD (www.bpk.go.id).

Pada tanggal 31 Oktober 2018 Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyerahkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia kepada 32 pemerintah daerah (www.daerah.sindonews.com). Kabupaten Jepara kembali meraih prestasi di bidang peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksaan terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapatkan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (www.bpkad.jepara.go.id). Pencatatan BPK Perwakilan Propinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 6 tahun berturut-turut dari TA 2012-(www.semarang.bpk.go.id). Dengan meningkatnya kualitas laporan 2017 keuangan pada OPD akan lebih mudah dalam menentukan keputusan-yang akan membawa pemerintahan Zke Warah yang Vlebih baik dan memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan yaitu Badan Pengawas Keuangan (BPK). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahun akan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terdapat empat opini yang diberikan dalam pemeriksa yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan pernyataan menolak memberi opini atau disebut juga Tidak Memberi Pendapat (TMP) (Wibawa dkk, 2017).

Penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat berupa laporan keuangan yang merupakan laporan yang sangat penting dalam suatu instansi karena dipakai sebagai acuan dalam menentukan keberhasilan suatu instansi. Laporan keuangan pemerintah adalah presentasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh suatu entitas sektor publik yang tujuannya untuk memberikan informasi keuangan entitas tersebut (Bastian, 2006 dalam Rahmadani, 2015). Hasil temuan penelitian mengenai pengaruh *Good Governance* dan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan adanya ketidak konsistenan antara satu peneliti dengan peneliti yang lainnya. Penelitian Maramis, dkk (2018) menunjukkan *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah namun untuk sistem akuntansi keuangan tidak berpengaruh signifikan. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian menurut Rahmadani (2015) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sejalan dengan Rahmadani (2015), penelitian Mene, dkk (2018) juga menunjukkan terdapat hubungan v positif antara pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian hasil penelitian Tua (2015) mendukung penelitian Maramis, dkk (2018) dan penelitian Rahmadani (2015) yang mengatakan bahwa *good governance*, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas sebuah laporan keuangan pemerintah daerah yang akan dibahas pada penelitian ini. Hal Pertama yaitu

Good Governance. Akuntabilitas suatu laporan keuangan pemerintah dinilai mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan good governance. Penerapan good governance, menuntut pemerintah untuk dapat memberikan informasi yang didasarkan pada prinsip transparansi, bertanggungjawab, partisipasi, keadilan, kemandirian, mudah dipahami dan sebenar-benarnya (Cadbury, 1992 dalam Kesuma dkk, 2017). Hal yang kedua yaitu Sistem Akuntansi Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual atau menggunakan komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Saat ini pemerintah sudah berpindah menjadi sistem akuntansi double entry dan berbasis akrual (accrual basis) dengan alasan untuk mendapatkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas (Rahmadani, 2015).

Hal ketiga yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, untuk entitas pemerintah dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah dan organisasional tentang pemerintahan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas (Rahmadani, 2015). Hal keempat adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk

meingkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, harus didukung juga oleh teknologi informasi yang memadai (Arfianti 2011 dalam Efendi 2017).

Hal kelima adalah Sistem Pengendalian Intern, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya kegiatan yang efektif, efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern jika dilaksanakan terus-menerus dengan baik dan dan secara optimal akan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang akan menghasilkan laporan yang berkualitas (Rahmadani, 2015).

Alasan dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Jepara tahun bersangkutan sehingga mendapat penilaian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada penelitian tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ini memang sudah banyak dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian dari Maramis, dkk (2018). Adapun

perbedaan penelitian terletak variable yang pertama vaitu pada independen. Pada penelitian Maramis, dkk (2018) menggunakan dua variabel independen yaitu good governance dan sistem akuntansi keuangan. Sedangkan pada penelitian ini telah ditambahkan tiga variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern. Penambahan variabel kompetensi sumber daya manusia, karena pada entitas pemerintahan dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintah, keuangan daerah dan organisasional tentang pemerintahan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas (Rahmadani, 2015).

Selanjutanya penambahan variabel pemanfaatan teknologi informasi karena dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, harus didukung juga oleh teknologi informasi yang memadai (Arfiyanti 2011 dalam Efendi 2017). Kemudian penambahan variabel sistem pengendalian intern karena memberikan keyakinan memadai atas tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas jika sistem pengendalian intern dilaksanakan terus menerus sengan baik dan secara optimal (Rahmadani 2015).

Perbedaan penelitian yang kedua berkaitan dengan objek penelitian.

Penelitian dari Maramis, dkk (2018) objeknya yaitu kota Manado, sedangkan objek penelitian ini OPD Kabupaten Jepara. Alasan pengambilan studi empiris organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten Jepara karena fenomena yang telah

dijelaskan di atas yaitu mendapatkan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 6 tahun berturut-turut dan variabel *Good Governance* yang belum pernah di teliti di kabupaten Jepara. Sedangkan jika pengambilan studi empiris lebih luas lagi dikhawatirkan responden mengisi data kuesioner tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dikarenakan sudah terlalu banyak peneliti yang ingin mendapatkan data tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul "Pengaruh Penerapan Good Governance, Sistem Akuntansi Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Jepara".

### 1.2 Ruang Lingkup

Untuk memudakan pembahasan dalam penelitian ini dan agar sesuai dengan tujuan penelitian maka penulis membatasi ruang ingkup pokok bahasan permasalahan sebagai berikut:

- Objek penelitian adalah variabel yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.
   Objek penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jepara.
- Variabel dependen yaitu tipe variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Penelitian ini menggunakan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen.

- 3. Variabel independen yaitu tipe variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Good Governance, Sitem Akuntansi Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem PengendalianmIntern sebgai variabel independen.
- 4. Pengambilan sampel hanya Pegawai Pemerintah Bagian Keuangan yang terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jepara.

# 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Apakah penerapan *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan pemerintah daerah?
- 2. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
- 3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
- 4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
- 5. Apakah penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah penelitian diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *good* 

governance, sistem akuntansi keuangan, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Membuktikan penerapan *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keungan pemerintah daerah.
- 2. Membuktikan penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keungan pemerintah daerah.
- 3. Membuktikan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keungan pemerintah daerah.
- 4. Membuktikan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keungan pemerintah daerah.
- 5. Membuktikan penerpan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### 1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini Zini Marapkan memberikan kegunaan atau Wmanfaat.

Adapun kegunaannatau manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu kegunaan secara praktis dan kegunaan secara teoritis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat untuk semua pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain:

## 1. Bagi Instansi Pemerintah

Manfaat atau kegunaan bagi instansi pemerintah yang di peroleh dari penelitian ini adalah hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai sumbangan pemikiran untuk"dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah guna memperbaiki dan meningkatkan kualitas laporanzkeuanganz pemerintah daerah.

#### 2. Bagi Pembaca

Manfaat atau kegunaan penelitian ini bagi pembaca adalah hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan gambaran awal bagi pembaca mengenai pengaruh penerapan *good governance*, sistem akuntansi keuangan, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### 1.5.2 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan Vdapat memberikan kegunaan atau manfaat secara teoritis sebagai berikut:

- 1. Hasil penelitian ini dapat memperkuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literature-literatur meupun penelitian di bidang Akuntansi.
- Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat untuk memperbanyak ilmu pengetahuan, sebagai referensi, dan memberikan sumbangan konseptual untuk penelitian selanjutnya.